

PEMBENTUKAN, NILAI, HINGGA PENGIMPLEMENTASIAN PANCASILA DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM INDONESIA

Tasya Putri Dwi Fanny

Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Fadilatil Gina

Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Sofia Rusmadani

Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Desti Tiara Ilya Putri

Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Melani Widya Fitri

Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Eka Amanda Sipahutar

Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Larasati

Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Akdila Bulanov

Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Alamat : Jalan Gurun Aua, Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam

Korespondensi penulis: tasyaputridwifanny@gmail.com

Abstrak. *This study examines the formation of Pancasila values within Indonesia's economic system, their alignment with Islamic economic principles, and their application in Islamic economic instruments. A qualitative method with a library research approach was employed. Data were collected from scientific journals, books, official reports, and relevant policy documents, then analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that Pancasila values are closely aligned with Islamic economic principles, including tawhid (monotheism), justice (al-'adl), brotherhood (ukhuwah), deliberation (shura), and social welfare (maslahah). These values are reflected in the development of Islamic banking, zakat, infaq, sadaqah, productive waqf, Islamic cooperatives, and the halal industry. The study concludes that integrating Pancasila values with Islamic economics can strengthen a just, inclusive, and sustainable national economy.*

Keywords: *Islamic Economy; Pancasila; Pancasila Economy; Social Justice.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan mengkaji pembentukan nilai-nilai Pancasila dalam sistem ekonomi Indonesia, keselarasan dengan prinsip ekonomi Islam, serta penerapannya pada berbagai instrumen ekonomi syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, laporan resmi, dan dokumen kebijakan yang relevan, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila sejalan dengan prinsip ekonomi Islam, terutama pada aspek tauhid, keadilan, persaudaraan, musyawarah, dan kemaslahatan. Implementasinya tercermin dalam pengembangan perbankan syariah, pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf produktif, koperasi syariah, serta industri halal. Integrasi keduanya berpotensi menjadi landasan pembangunan ekonomi nasional yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Ekonomi Islam; Ekonomi Pancasila; Keadilan Sosial; Pancasila; Ekonomi Syariah.*

PENDAHULUAN

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk dalam pembangunan ekonomi nasional. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila lahir dari pengalaman historis bangsa Indonesia yang dipengaruhi oleh agama, budaya, adat istiadat, dan semangat perjuangan kemerdekaan. Oleh karena itu, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar konstitusional negara, tetapi juga sebagai landasan moral dalam mewujudkan sistem ekonomi yang berorientasi pada keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan pemerataan pembangunan (Era et al., 2022).

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang positif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa pangsa pasar perbankan syariah mencapai 7,72% pada tahun 2024, yang menunjukkan meningkatnya penerimaan masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah (Mayasari, 2024). Selain itu, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melaporkan bahwa penghimpunan zakat nasional terus mengalami peningkatan dan ditargetkan mencapai Rp41 triliun pada tahun 2024 (BAZNAS, 2024). Pertumbuhan juga terjadi pada sektor industri halal yang menunjukkan perkembangan positif pada berbagai sektor, khususnya makanan dan minuman halal, fesyen muslim, serta produk halal lainnya (Sari, 2024). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah semakin berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Secara teoritis, ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah dengan tujuan mencapai kesejahteraan (falah) melalui penerapan prinsip tauhid, keadilan (al-'adl), keseimbangan, persaudaraan (ukhuwah), dan tanggung jawab sosial. Sistem ekonomi Islam menempatkan kemaslahatan masyarakat sebagai tujuan utama kegiatan ekonomi sehingga tidak hanya berorientasi pada keuntungan individu, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan dan pengurangan kesenjangan sosial. Menurut Abbas (2012), ekonomi Islam mengedepankan distribusi kekayaan yang adil melalui berbagai instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lembaga keuangan syariah.

Di sisi lain, konsep Ekonomi Pancasila yang dikemukakan oleh Mubyarto menekankan demokrasi ekonomi, asas kekeluargaan, gotong royong, serta peran negara dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Sistem Ekonomi Pancasila menolak praktik eksploitasi ekonomi dan menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan. Prinsip-prinsip tersebut memiliki kesamaan dengan ekonomi Islam, terutama dalam aspek keadilan, kesejahteraan bersama, pemerataan distribusi pendapatan, dan tanggung jawab sosial (Akbar & Jadid, 2019).

Keselarasan antara nilai-nilai Pancasila dan prinsip ekonomi Islam menunjukkan bahwa keduanya memiliki orientasi yang sama dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki keterkaitan dengan prinsip tauhid, nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sejalan dengan konsep al-'adl, nilai kerakyatan memiliki kesamaan dengan prinsip syura, sedangkan nilai persatuan memiliki keterkaitan dengan konsep ukhuwah dalam Islam. Kesamaan tersebut menjadikan ekonomi Islam relevan sebagai salah satu instrumen dalam mewujudkan tujuan Ekonomi Pancasila di Indonesia (Saputra et al., 2025).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas hubungan antara Ekonomi Pancasila dan ekonomi Islam, sebagian besar penelitian masih berfokus pada pembahasan konseptual maupun implementatif secara terpisah. Penelitian yang mengkaji secara komprehensif mengenai proses

pembentukan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan sistem ekonomi Indonesia, kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta implementasinya dalam berbagai instrumen ekonomi syariah masih relatif terbatas. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk menjelaskan integrasi nilai-nilai Pancasila dan ekonomi Islam dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembentukan nilai-nilai Pancasila dalam sistem ekonomi Indonesia, mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta menganalisis implementasi nilai-nilai tersebut dalam berbagai instrumen ekonomi syariah di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembentukan nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan sistem ekonomi Indonesia serta mengkaji keterkaitan antara nilai-nilai tersebut dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem ekonomi Islam di Indonesia melalui berbagai instrumen ekonomi syariah, seperti perbankan syariah, zakat, infak, sedekah, wakaf produktif, dan koperasi syariah. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kontribusi integrasi nilai-nilai Pancasila dan ekonomi Islam dalam mewujudkan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian ilmiah mengenai hubungan antara nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks pembangunan ekonomi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti, mahasiswa, dan akademisi yang ingin mengembangkan studi tentang ekonomi Pancasila, ekonomi Islam, serta integrasi keduanya dalam sistem perekonomian nasional.

KAJIAN TEORI

Untuk memberikan landasan konseptual yang jelas, penelitian ini menguraikan beberapa teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun teori-teori tersebut meliputi :

1. Konsep Pancasila

Pancasila merupakan dasar filosofis negara Indonesia yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai ideologi negara, Pancasila tidak hanya menjadi landasan normatif dalam bidang politik dan hukum, tetapi juga menjadi acuan dalam pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila lahir dari proses historis yang panjang melalui akumulasi pengalaman bangsa Indonesia yang dipengaruhi oleh nilai agama, budaya, adat istiadat, dan semangat perjuangan kemerdekaan.

Secara substantif, Pancasila mengandung lima nilai fundamental, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kelima nilai tersebut membentuk suatu sistem yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam konteks pembangunan ekonomi, Pancasila menempatkan manusia sebagai subjek utama pembangunan sehingga aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan, kesejahteraan, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, Pancasila menjadi dasar moral dan etis dalam pembentukan sistem ekonomi nasional yang berorientasi pada kemakmuran bersama.

Selain itu, Pancasila menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus tetap memperhatikan nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial. Dengan demikian, keberhasilan

pembangunan tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan nasional, tetapi juga dari kemampuan sistem ekonomi dalam menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. Konsep Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi yang berlandaskan ajaran Islam dan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Sistem ini memandang kegiatan ekonomi sebagai bagian dari ibadah yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, etika, dan tanggung jawab sosial.

Prinsip utama dalam ekonomi Islam meliputi tauhid, keadilan, keseimbangan, kebebasan yang bertanggung jawab, dan persaudaraan. Prinsip tauhid menempatkan Allah SWT sebagai pemilik mutlak seluruh sumber daya yang ada di bumi, sedangkan manusia berperan sebagai khalifah yang bertugas mengelola sumber daya tersebut secara bijaksana. Prinsip keadilan menuntut adanya distribusi kekayaan yang proporsional dan menolak segala bentuk eksploitasi ekonomi yang dapat menimbulkan ketimpangan sosial.

Dalam praktiknya, ekonomi Islam diwujudkan melalui berbagai instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lembaga keuangan syariah. Instrumen-instrumen tersebut berfungsi sebagai sarana distribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, tujuan akhir ekonomi Islam bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tercapainya kemaslahatan dan kesejahteraan bersama (falah).

3. Teori Ekonomi Pancasila

Ekonomi Pancasila merupakan konsep ekonomi yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan konstitusi Indonesia. Konsep ini muncul sebagai alternatif terhadap sistem ekonomi kapitalis yang menekankan kebebasan individu secara mutlak maupun sistem sosialis yang memberikan dominasi penuh kepada negara. Ekonomi Pancasila berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat melalui mekanisme ekonomi yang berkeadilan.

Menurut Mubyarto, Ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan demokrasi ekonomi dan bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam sistem ini, kegiatan ekonomi diselenggarakan berdasarkan asas kekeluargaan, gotong royong, dan kerja sama yang bertujuan meningkatkan kemakmuran bersama. Negara memiliki peran strategis dalam mengatur dan mengawasi aktivitas ekonomi agar tidak terjadi monopoli, eksploitasi, maupun kesenjangan sosial yang berlebihan.

Karakteristik utama Ekonomi Pancasila meliputi pengakuan terhadap hak milik individu yang disertai tanggung jawab sosial, pengembangan koperasi sebagai soko guru perekonomian, pemerataan hasil pembangunan, serta keterlibatan negara dalam mengelola sumber daya yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan karakteristik tersebut, Ekonomi Pancasila berupaya menciptakan sistem ekonomi yang efisien sekaligus berkeadilan.

4. Hubungan Pancasila dan Ekonomi Islam

Pancasila dan ekonomi Islam memiliki hubungan yang erat karena keduanya berorientasi pada terciptanya kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Meskipun berasal dari landasan

yang berbeda, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara dan ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi berbasis syariah, keduanya memiliki sejumlah nilai yang saling mendukung.

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila memiliki kesesuaian dengan prinsip tauhid dalam ekonomi Islam. Kedua konsep tersebut menekankan pentingnya moralitas dan tanggung jawab dalam aktivitas ekonomi. Selanjutnya, nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam Pancasila juga sejalan dengan prinsip al-'adl yang menjadi salah satu fondasi utama ekonomi Islam. Keduanya menolak segala bentuk eksploitasi dan mendorong distribusi kesejahteraan yang lebih merata.

Persamaan lainnya terlihat pada nilai musyawarah yang tercermin dalam sila keempat Pancasila dan konsep syura dalam Islam. Kedua prinsip tersebut menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, konsep persatuan dalam Pancasila memiliki kesamaan dengan prinsip ukhuwah yang menekankan solidaritas dan kerja sama dalam kehidupan sosial maupun ekonomi.

Keselaran nilai tersebut menunjukkan bahwa penerapan ekonomi Islam di Indonesia dapat berjalan selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Bahkan, ekonomi Islam dapat menjadi instrumen yang memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Secara filosofis, Ekonomi Pancasila menempatkan manusia sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan sistem ekonomi dalam menciptakan pemerataan pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus memperhatikan aspek kemanusiaan, gotong royong, dan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat.

Mubyarto menjelaskan bahwa karakteristik utama Ekonomi Pancasila meliputi adanya pengakuan terhadap hak milik perseorangan yang tetap memiliki fungsi sosial, peran negara dalam mengendalikan sektor-sektor strategis, pelaksanaan demokrasi ekonomi, serta pengembangan koperasi sebagai bentuk nyata asas kekeluargaan. Prinsip tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. (Institusionalisasi, 2021).

5. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai hubungan antara Pancasila dan ekonomi Islam telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Salah satu penelitian yang relevan dilakukan oleh (Adzkiya, 2020) yang menganalisis hubungan antara maqashid al-syariah dan Pancasila dalam sistem ekonomi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip maqashid al-syariah memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam upaya mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pengembangan ekonomi Islam di Indonesia dapat berjalan selaras dengan Pancasila sebagai dasar negara.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Marsudi dan Purbasari (2022) menjelaskan bahwa implementasi Sistem Ekonomi Pancasila dalam kebijakan pemerintah Indonesia masih menjadi landasan penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan sebagai pedoman dalam perumusan kebijakan ekonomi nasional.

Selanjutnya, penelitian (Yogi Saputra, Syukri Iska, Fandi Ahmad Marlion, 2025) mengenai sinkronisasi Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Pancasila menemukan bahwa kedua sistem memiliki kesamaan nilai fundamental berupa keadilan sosial, keseimbangan, gotong royong, dan kemaslahatan bersama. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa integrasi kedua sistem dapat diwujudkan melalui penguatan instrumen ekonomi syariah, kebijakan redistributif, serta pemberdayaan sektor ekonomi rakyat.

Meskipun penelitian-penelitian terdahulu telah menjelaskan hubungan antara Pancasila dan ekonomi Islam, sebagian besar kajian masih berfokus pada analisis kesesuaian nilai atau sinkronisasi kedua sistem ekonomi. Penelitian yang secara khusus mengkaji proses pembentukan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan sistem ekonomi Indonesia, kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta implementasinya dalam berbagai instrumen ekonomi syariah secara komprehensif masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan analisis yang lebih menyeluruh mengenai integrasi nilai-nilai Pancasila dan ekonomi Islam dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) untuk mengkaji pembentukan nilai-nilai Pancasila serta implementasinya dalam sistem ekonomi Islam di Indonesia. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen resmi yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai keterkaitan nilai-nilai Pancasila dengan prinsip dan implementasi ekonomi Islam di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pembentukan Nilai-Nilai Pancasila

Nilai-nilai Pancasila merupakan hasil kristalisasi dari nilai budaya, agama, adat istiadat, dan pengalaman historis bangsa Indonesia yang berkembang secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat. Proses pembentukan nilai tersebut tidak terlepas dari dinamika perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan dan membangun identitas nasional yang mampu mengakomodasi keberagaman sosial, budaya, dan agama. Oleh karena itu, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai sistem nilai yang menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang ekonomi.

Dalam perspektif ekonomi, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan moral yang mengarahkan setiap aktivitas ekonomi agar tetap berorientasi pada etika dan tanggung jawab sosial. Nilai kemanusiaan menekankan penghormatan terhadap martabat manusia sehingga kegiatan ekonomi harus terhindar dari praktik eksploitasi dan ketidakadilan. Nilai persatuan mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang mampu memperkuat integrasi nasional, sedangkan nilai kerakyatan mengedepankan musyawarah dalam pengambilan kebijakan ekonomi. Adapun nilai keadilan sosial menjadi tujuan utama pembangunan ekonomi yang diwujudkan melalui pemerataan kesejahteraan dan distribusi sumber daya yang lebih adil.

Dengan demikian, pembentukan nilai-nilai Pancasila dalam sistem ekonomi Indonesia menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan

keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi dalam penyelenggaraan perekonomian nasional sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan prinsip demokrasi ekonomi dan asas kekeluargaan.

2. Kesesuaian dengan Ekonomi Islam

Pancasila dan ekonomi Islam memiliki sejumlah kesamaan nilai yang menunjukkan adanya hubungan yang harmonis antara keduanya. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki kesesuaian dengan prinsip tauhid dalam ekonomi Islam yang menempatkan Allah SWT sebagai sumber utama segala aturan kehidupan. Prinsip tersebut mengajarkan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan material, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan bernilai ibadah.

Nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila juga sejalan dengan prinsip al-'adl dalam ekonomi Islam. Kedua konsep tersebut menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan, perlindungan terhadap kelompok lemah, serta penolakan terhadap segala bentuk eksploitasi ekonomi. Selain itu, sila Persatuan Indonesia memiliki keterkaitan dengan konsep ukhuwah Islamiyah yang mendorong terciptanya solidaritas sosial dan kerja sama dalam kehidupan ekonomi.

Kesesuaian lainnya dapat ditemukan pada sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan yang memiliki kemiripan dengan prinsip syura dalam Islam. Kedua konsep tersebut menempatkan musyawarah sebagai mekanisme penting dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila dan ekonomi Islam pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

3. Implementasi dalam Sistem Ekonomi Islam Indonesia

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem ekonomi Islam di Indonesia dapat dilihat melalui berbagai lembaga dan instrumen ekonomi syariah yang berkembang dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu bentuk implementasi tersebut adalah perkembangan perbankan syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil dan menghindari praktik riba. Sistem ini mencerminkan nilai keadilan dan keseimbangan yang menjadi tujuan bersama antara ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila.

Selain perbankan syariah, implementasi nilai-nilai tersebut juga terlihat dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif. Instrumen-instrumen tersebut berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pengelolaan yang profesional, dana sosial Islam dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan usaha mikro, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Penerapan nilai Pancasila dalam ekonomi Islam juga dapat ditemukan pada pengembangan koperasi syariah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis syariah. Kegiatan tersebut mencerminkan semangat gotong royong, kekeluargaan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat yang menjadi karakteristik utama ekonomi Pancasila. Dengan demikian, implementasi ekonomi Islam di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai sistem ekonomi berbasis syariah, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan ekonomi nasional.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Industri perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan yang ditandai dengan peningkatan aset, pembiayaan, dan pangsa pasar. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa pada tahun 2024 aset perbankan syariah mencapai sekitar Rp980 triliun dengan pangsa pasar sebesar 7,72% dari total industri perbankan nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah semakin diterima oleh masyarakat dan berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Selain sektor perbankan, pengelolaan zakat juga mengalami perkembangan yang signifikan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melaporkan bahwa penghimpunan zakat pada tahun 2024 berhasil mencapai lebih dari Rp1 triliun pada triwulan ketiga dan secara nasional ditargetkan mencapai Rp41 triliun. Peningkatan penghimpunan zakat menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap instrumen distribusi kekayaan yang menjadi salah satu pilar penting dalam ekonomi Islam. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. (BAZNAS), 2024).

Perkembangan ekonomi Islam juga terlihat dari pertumbuhan industri halal nasional. Pada tahun 2024 sektor halal value chain Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif, khususnya pada sektor makanan dan minuman halal serta industri fesyen muslim. Selain itu, implementasi kebijakan sertifikasi halal secara nasional semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi syariah dunia. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa nilai-nilai Pancasila dan ekonomi Islam dapat berjalan secara harmonis dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Sari, 2024).

4. Tantangan dan Peluang

Meskipun perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem ekonomi Islam masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai ekonomi syariah. Banyak masyarakat yang masih memiliki pemahaman terbatas mengenai prinsip, produk, dan manfaat ekonomi Islam sehingga pemanfaatannya belum optimal. Selain itu, tantangan lain berupa kesenjangan ekonomi, persaingan global, serta dominasi sistem ekonomi konvensional yang masih kuat dalam berbagai sektor ekonomi.

Di sisi lain, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi Islam karena didukung oleh jumlah penduduk muslim terbesar di dunia serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk dan layanan berbasis syariah. Perkembangan industri halal, transformasi digital dalam sektor keuangan syariah, serta dukungan regulasi pemerintah menjadi faktor penting yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia.

Dengan memanfaatkan peluang tersebut dan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila, sistem ekonomi Islam berpotensi menjadi salah satu instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Integrasi antara nilai-nilai Pancasila dan prinsip ekonomi Islam tidak hanya memperkuat identitas ekonomi nasional, tetapi juga mampu memberikan solusi terhadap berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia pada era globalisasi.

Meskipun perkembangan ekonomi syariah cukup pesat, tingkat literasi keuangan syariah masyarakat masih relatif rendah dibandingkan dengan potensi yang dimiliki Indonesia. Selain itu, pangsa pasar perbankan syariah yang masih berada di bawah 10% menunjukkan bahwa dominasi sistem keuangan konvensional masih cukup kuat. Tantangan lainnya adalah kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi produk syariah, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam layanan keuangan syariah.(Mayasari, 2024).

Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah global karena didukung oleh jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, pertumbuhan industri halal, perkembangan teknologi digital, serta dukungan regulasi pemerintah terhadap pengembangan ekonomi syariah. Jika nilai-nilai Pancasila dan prinsip ekonomi Islam terus diintegrasikan dalam kebijakan ekonomi nasional, maka Indonesia berpotensi membangun sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kewarganegaraan dan wawasan kebangsaan merupakan dua konsep penting yang menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kewarganegaraan menekankan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, sedangkan wawasan kebangsaan berfungsi sebagai cara pandang yang mengutamakan persatuan, kesatuan, dan kepentingan nasional di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Kedua konsep tersebut memiliki peran yang besar dalam membentuk karakter bangsa yang bertanggung jawab, demokratis, toleran, serta memiliki rasa cinta tanah air. Dalam perspektif Islam, nilai-nilai seperti amanah, keadilan, ukhuwah, dan moderasi memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip kewarganegaraan dan wawasan kebangsaan. Nilai amanah mendorong terbentuknya sikap tanggung jawab dan integritas, keadilan menumbuhkan penghormatan terhadap hak dan kewajiban, ukhuwah memperkuat persatuan dan solidaritas sosial, sedangkan moderasi mendorong sikap toleran dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Dengan demikian, ajaran Islam memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk karakter bangsa yang berakhlak mulia dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Di era globalisasi, integrasi antara nilai-nilai kewarganegaraan, wawasan kebangsaan, dan ajaran Islam menjadi semakin relevan dalam menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi identitas nasional. Melalui penguatan ketiga aspek tersebut, diharapkan terbentuk generasi yang religius, berintegritas, cinta tanah air, menghargai keberagaman, serta mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai Islam perlu terus ditanamkan melalui pendidikan dan kehidupan sosial sebagai fondasi dalam membangun karakter bangsa Indonesia yang maju, harmonis, dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

Adzkiya, U. (2020). Analisis Maqashid Al-Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 10(1), 23–35.

[https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10\(1\).23-35](https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10(1).23-35)

- BAZNAS. (2024). BAZNAS RI Capai Target Pengumpulan Zakat Rp1 Triliun pada 2024. Diakses dari https://baznas.go.id/news-show/BAZNAS_RI_Capai_Target_Pengumpulan_Zakat_Rp1_Triliun_pada_2024/2604
- Institusionalisasi, I. D. A. N. (2021). Internalisasi dan institusionalisasi kebijakan ekonomi Pancasila, 1(1).
- Kaelan. (2014). *The Philosophy of Pancasila: The Way of Life of Indonesian Nation*. Yogyakarta: Paradigma Press.
- Kaelan. (2015). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Mayasari, S. (2024). Pangsa Pasar Perbankan Syariah Tumbuh 7,38% pada Maret 2024, OJK Beberkan Pemicunya. Diakses dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/pangsa-pasar-perbankan-syariah-tumbuh-738-pada-maret-2024-ojk-beberkan-pemicunya>
- Mubyarto. (1997). *Ekonomi Pancasila*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saputra, Y., Iska, S., Marlion, F. A., & H. A. (2025). Sinkronisasi Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Pancasila. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4758>
- Sari, H. P. (2024). Industri Halal Indonesia Tumbuh Positif Kuartal I-2024. Diakses dari <https://money.kompas.com/read/2024/08/26/130057126/industri-halal-indonesia-tumbuh-positif-kuartal-i-2024>